

Performance Measurement With The Value For Money Approach As An Embodiment Of Good Governance (Case Study At The Surabaya Social Service For 2017-2021)

Pengukuran Kinerja Dengan Pendekatan Value For Money Sebagai Perwujudan Good Governance (Studi Kasus Pada Dinas Sosial Surabaya Tahun 2017-2021)

Isro'ul Hasanah^{1*}, Muhammad Taufik Hidayat²

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya^{1,2}

lsroulhasanah2@gmail.com¹, taufikhidayat@untag-sby.ac.id²

*Corresponding Author

ABSTRACT

This research aim to measure, analyze and find what the performance of the Surabaya City Social Service is like from 2017-2021 as measured by the Government Agencies Performance Accountability Report on Value For Money. The metod used in this study is the use of qualitative descriptives methods, using data source, namely primary and secondary data. Data collection technique use surveys, interviews and documentation. The informants in the study were one general and staffing sub-coordinator head, two general and staffing staff and another from the community. The result of this study are that the performances of the Surabaya City Social Service is economical, efficient and effective. On economic measurement based on the budget. Efficient measurement is based on the ratio of the number of realized outputs produced to inputs. Measuring effectiveness can be reviewed through comparisons between budget targets and actual realization. Based on the assessment of Good Governance applying the principle of acountability and transparency, the accountability assessment as measured by LAKIP and SAP shows that the Surabaya City Social Service has carried out their performance in an accountable manner. As for the assessment of transparency, it has succeeded in implementing transparency in the public.

Keywords: Value For Money, Economical, Efficient, Effectiveness, Good Governance, Accountability, Transparency.

ABSTRAK

Penelitian ini dengan tujuan guna pengukuran, penganalisisan dan mengetahui seperti apa kinerja pada Dinas Sosial Kota Surabaya dari tahun 2017-2021 yang di ukur dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) mempergunakan *Value For Money*. Metode yang dipakai dalam penelitian ini yakni mempergunakan metode deskriptif kualitatif, menggunakan sumber data yakni data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan survei, wawancara dan dokumentasi. Informan pada penelitian yakni satu kepala sub koordinator umum dan kepegawaian, dua staff umum dan kepegawaian dan satu lagi dari masyarakat. Hasil penelitian ini yakni Kinerja pada Dinas Sosial Kota Surabaya telah ekonomis, efisien, dan efektif. Pada pengukuran ekonomis berlandaskan pada anggaran. Pengukuran efisien berdasar pada rasio jumlah realisasi *output* yang terhasilkan dengan *input*. Pengukuran efektivitas bisa ditinjau melalui perbandingan antara target aggaran dengan realisasi yang sesungguhnya. Berdasar pada penilaian *Good Governance* menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi, penilaian akuntabilitas yang diukur dari LAKIP dan SAP menunjukan Dinas Sosial Kota Surabaya sudah melaksanakan kinerja mereka dengan akuntabel. Untuk penilaian dari transparansi menunjukan sudah berhasil untuk melaksanakan transparansi pada masyarakat.

Kata kunci: Value For Money, Ekonomis, Efisien, Efektivitas, Good Governance, Akuntabilitas, Transparansi.

1. Pendahuluan

Akuntabilitas publik bukan sebatas guna menampilkan kemampuan uang publik bisa dipergunakan dengan ekonomis, efisien, dan efektif, juga berhubungan dengan suatu kewajiban untuk memberik informasi dan tanggungjawab terkait yang sudah, sedang, dan

akan direncanakan lembaga pemerintahan. Selain itu juga berfungsi menjadi alat ukur kinerja lembaga pemerintahan, sehingga bisa diketahui sejauh apa kinerja pelayanan publik yang sudah dilakukan.

Pengukuran kinerja menjadi faktor penting didalam suatu organisasi. Tidak hanya dalam penilaian anggaran sektor publik, akuntabilitas pengukuran kinerja sebuah organisasi juga dibuthkan guna hasilkan pelayanan publik yang lebih baik, berkualitas, serta tepat sasaran. Pengukuran kinerja organisassi sektor publik juga dilaksanakan dalam membantu perbaikan kinerja pemerintah dengan fokus dalam tujuan dan sasaran program unit kerja dan kegiatan pada organisasi. Melalui organisasi sektor publik diwajibkan untuk tingkatkan efisien dan efektivitasnya untuk memberi pelayanan publik pada *user* layanan publik. Juga pengukuran kinerja dipergunakan untuk pengalokasian sumber daya dan membuat keputusan. Hal ini mampu wujudkan pertanggung jawaban publik dan perbaikani komunikasi organisasi.

Konsep *value for money* adalah suatu prinsip tata kelola organisasi sektor publik yang menjadi fundamental 3 elemen utama yakni: ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Supaya bisa tercapai value for money di organisasi sektor publik yaitu mempergunakan biaya input paling kecil guna mencapai output yang optimum untuk wujudkan tujuan organisasi.

Dari uraian diatas, maka penulis tertarik meneliti pengukuran kinerja dengan mengambil judul "Pengukuran Kinerja Dengan Pendekatan Value For Money Sebagai Perwujudan good Governance".

2. Tinjauan Pustaka

Organisasi Sektor Publik

Organisasi ialah serikat formal, terstruktur, dan terorganisir yang disatukan supaya mencapai sebuah tujuan organisasi. Tiap organisasi wajib memiliki manajemen untuk pelaksanaan fungsi organisasi secara baik. Keberadaan manajemen organisaasi, pengawasn, dan pengendalian dalam anggota organisasi dan sumber daya lain yang bermanfaat dalam jalankan organisasi berdasar pada visi dan misi yang sudah ditentukan.

Pengukuran Kinerja

ialah sebuah proses menilai kemajuan pekerjaan pada pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditntukan, juga informasi terhadap efisiensi pemakaian sumber daya untuk hasilkan produk (Zubair, 2016).

(Mahmudi, 2007) berpendapat tujuan pelaksanaan pengukuran kinerja dalam sektor publik ialah: (1) Dapat ketahui tingkat tercapainya tujuan organisasi, (2) Sediakan sarana pembelajaran pegawai, (3) Perbaikan kinerja periode kedepannya, (4) Memberi pertimbangan yang sistematis untuk pembuatan keputusan memberi reward atau punishment, (4) Pemotivasian pegawai, (6) Terciptanya akuntabiilitas.

Indikator kinerja ialah pengetahuan yang menandai baik kualitatif ataupun kuantitatif bahwa perusahaan, kinerja yang terjadi pada perusahaan tersebut (Amir, 2018). Sedangkan menurut (Sedermayanti, 2017) berpendapat] indikator kinerja ialah sebuah standar kuantitatif dan kualitatif yang menunjukkan tingkat pencapaian suatu sasaran ataupun tujuan yang telah ditetapkan.

Konsep Value For Money

Didefinisikan sebagai tolak ukur pengukuran kinerja dalam organisasi pemerintah berdasar dalam ukuran ekonomis, efisiensi, dan efektivitas (Arisaudi, 2016). (Setyanningrum, 2017) menyatakan sebagai konsep pengelolaan keuangan organisasi sektor publik yang didasari unsur ekonomis, efisiensi serta efektivitas.

1) Ekonomis

Menunjukkan keterkaitan dalam harga pasar dan masukan yang sering disebut ekonomi ialah praktik membeli barang dan jasa input pada tingkat kualitas tertentu dan harga paling baik yang memungkinkan (*spendingless*). Teknik pengukuran tingkat ekonomis adalah sebagai berikut:

$$\text{Ekonomis} = \frac{\text{Input}}{\text{Anggaran (Rp)}} \times 100 \%$$

Kriteria:

<100% = ekonomis

>100% = tidak ekonomis

=100% = ekonomis berimbang

2) Efisiensi

Berkaitan pada konsep produktivitas berdaya guna untuk pemakaian sumber daya, yakni pemakaian sumber daya diperkecil dan hasilnya dimaksimalkan. Rumusnya adalah sebagai berikut:

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Output}}{\text{Input}} \times 100 \%$$

Kriteria:

<100% = efisien

>100% = Tidak Efisien

=100% = efisien berimbang

3) Efektifitas

Menurut (Trihastuti A, 2017), berpedapat bahwa Efektivitas adalah sebuah ukuran yang menggambarkan sejauh apa target yang bisa dicapai baik melalui kuantitas ataupun waktu. Kian tinggi presentase target dicapai, kian tinggi tingkat efektifitasnya. Rumusnya adalah sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Output}}{\text{Outcome}} \times 100 \%$$

Kriteria:

>100% = efektif

<100% = tidak efektif

=100% = efektif berimbang

Value for money memiliki manfaat guna pengukuran kinerja keuangan organisasi sektor publik sebab amat mempermudah sebuah instansi pemerintah supaya bisa memberi kesadaran terhadap uang publik menjadi fundamental dilaksanakannya akuntabilitas publik.

Good Governance

Governance adalah prinsip sesuai pada demokrasi, partisipasi masyarakat yang mesti dijalankan pada sektor kehidupan. Mempunyai fungsi agar tercipta transparansi (keterbukaan) pemerintah dengan masyarakat. Penerapan good governance dengan harapan mampu bangun pemerintahan dan jajarannya yang bersih dari korupsi.

Akuntabilitas

Akuntabilitas publik ialah kewajiban pihak pemegang amanah guna bertanggungjawab, sajikan dan ungkapkan semua aktivitasnya dan kegiatan yang jadi tanggungjawabnya pada pihak pemberi amanah mempunyai hak dan kewewenangan guna untuk memohon

pretanggungjawaban (Mardiasmo 2009). (Mahmudi, 2015) berpendapat akuntabilitas ialah kewajiban pemerintah terkait pengelolaan sumber daya, melapor, dan mengungkap semua aktivitas terkait pada pemakaian sumber daya publik pada pemberi mandat.

Transparansi

Transparansi berarti keterbukaan, maka supaya pemerintah memiliki keterbukaan pada masyarakatnya, dibangun sebagai dasar bebasnya arus informasi dengan langsung bisa diterima oleh mereka yang memerlukan.

Dalam Standar Akuntansi Pemerintah PP No 24 Tahun 2005, Transparansi ialah memberik informasi keuangan terbuka dan jujur pada masyarakat berdasar pada pertimbangan bahwa masyarakat mempunyai hak tahu atas pertanggungjawaban pemerintah terkait pengelolaan keuangan sesuai undang-undang.

3. Metode Penelitian

Desain penelitian pada penelitian ini ialah deskriptif kualitatif yakni mempergunakan studi kasus dan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Sosial Kota Surabaya di Jl. Arief Rahman Hakim No.131-133, Keputih, Sukolilo, Kota Surabaya, Jatim. Tujuan penelitian yaitu mengukur kinerja instansi pemerintah di Kota Surabaya menggunakan pendekatan Value For Money sebagai perwujudan Good Governance. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Desember – Selesai. Jenis data yang dipergunakan pada penelitian ini, yakni data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu (1) Survey Pendahuluan, melaksanakan survei prapenelitian pada objek penelitian. (2) Wawancara (3) Dokumentasi, pengecekan langsung dokumen, catatan, arsip, dan buku terkait permasalahan yang hendak diteliti. Metode analisis data mempergunakan metode kualitatif. Tahapannya ialah: (1) Mengumpulkan informasi dan identifikasi data pada Dinas Sosial Kota Surabaya, (2) Mendeskripsikan data penelitian terkait kajian penelitian pada Dinas Sosial Kota Surabaya, (3) Melaksanakan analisis data dan pembahasan mengenai pengukuran dengan metode *value for money* dan *good governance* pada Dinas Sosial Kota Surabaya, (4) Menarik kesimpulan.

4. Hasil dan Pembahasan

Berdasar UU RI Nomor 15 Tahun 2004 menjelaskan untuk *support* berhasilnya penyelenggaraan negara, pengelolaan keuangan negara harus dilaksanakan dengan tertib, tata dalam peraturan undang-undang, ekonomis, efisien, efektif, transparan dan rasa keadilan diperhatikan dengan bertanggungjawab. Hal ini mendukung mengenai pengukuran kinerja Dinas Sosial Kota Surabaya dengan mempergunakan *value for money*. Ekonomis berkaitan pada masukan, efisiensi mengenai masukan dan keluaran, efektivitas berkaitan keluaran dan dampak. Perlu dilakukan pengukuran dan pencatatan pada seluruh aktivitas yang dilakukan Dinas Sosial Kota Surabaya, sehingga dapat mengukur keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi (Permana & Riharjo, 2017).

Pengukuran Kinerja Dinas Sosial Kota Surabaya Dari Aspek Ekonomi

Berikut ialah tingkat pencapaian program dan kegiatan pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Sosial Kota Surabaya Tahun 2017 – 2021, jadi target anggaran yang telah tercapai yaitu sebagai berikut:

Tabel 1. Pengukuran Ekonomi Tahun 2017

Tahun	Kegiatan	Anggaran (RP)	Realisasi (RP)
2017	Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	168,314,871,206	155,024,570,193
	Program pemberdayaan kelembagaan	1,894,803,188	1,604,302,913

kesejahteraan sosial		
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	41,942,998,547	41,473,122,245
Program Peningkatan Ketenteraman, Ketertiban dan Kenyamanan Lingkungan	12,244,834,930	10,802,497,255
Program pengembangan wawasan dan karakter kebangsaan dalam konteks budaya lokal	6,643,437,561	5,864,611,661
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	155,081,750	153,728,191
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3,557,227,069	3,012,458,207
Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan	425,775,507	369,771,409
Jumlah Anggaran	235,186,029,758	218,305,062,074

Sumber: LAKIP 2017 Dinas Sosial Kota Surabaya Diolah, 2022

Tabel 2. Pengukuran Ekonomi Tahun 2018

Tahun	Kegiatan	Anggaran (RP)	Realisasi (RP)
2018	Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	177.653.645.732	163.255.660.121
	Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial	2.149.606.121	1.915.096.753
	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	34.268.173.384	31.836.650.780
	Program Peningkatan Ketenteraman, Ketertiban dan Kenyamanan Lingkungan	14.686.579.538	12.643.117.572
	Program pengembangan wawasan dan karakter kebangsaan dalam konteks budaya lokal	7.283.419.528	6.737.624.861
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	190.938.625	179.519.627
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	4.716.695.316	4.117.789.735
	Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan	619.336.453	557.952.265
	Jumlah Anggaran	241.568.394.697	221.243.411.714

Sumber: LAKIP 2018 Dinas Sosial Kota Surabaya Diolah, 2022

Tabel 3. Pengukuran Ekonomi Tahun 2019

Tahun	Kegiatan	Anggaran (RP)	Realisasi (RP)
2019	Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	187,000,542,966	169,061,326,982

Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial	2,548,348,618	2,223,652,924
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	40,084,660,475	39,360,695,203
Program Peningkatan Ketenteraman, Ketertiban dan Kenyamanan Lingkungan	14,539,998,849	13,000,487,251
Program pengembangan wawasan dan karakter kebangsaan dalam konteks budaya lokal	7,784,548,596	7,217,476,855
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	5,063,339,681	4,861,409,341
Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan	778,110,926	697,149,420
Jumlah Anggaran	257,799,550,111	236,422,197,976

Sumber: LAKIP 2019 Dinas Sosial Kota Surabaya Diolah, 2022

Tabel 4. Pengukuran Ekonomi Tahun 2020

Tahun	Kegiatan	Anggaran (RP)	Realisasi (RP)
2020	Program Bantuan Masyarakat Berpenghasilan Rendah	4.176.817.339	3.719.504.630
	Program Partisipasi Keagamaan	13.510.136.668	12.003.405.683
	Program Partisipasi Kepahlawanan	4.557.140.816	4.401.028.015
	Program Pelayanan Kebutuhan Dasar dan Rehabilitasi Sosial	32.034.289.491	28.521.870.957
	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	581.453.280	306.120.400
	Program Pengendalian Layanan Sosial	2.923.252.045	2.830.030.489
	Program Rehabilitasi Rumah Tapak Tidak Layak Huni	18.382.596.116	18.019.411.517
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	4.954.286.940	4.775.245.024
	Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan	777.943.393	617.531.076
	Jumlah Anggaran	81.897.916.088	75.194.147.791

Sumber: LAKIP 2020 Dinas Sosial Kota Surabaya Diolah, 2022

Tabel 5. Pengukuran Ekonomi Tahun 2021

Tahun	Kegiatan	Anggaran (RP)	Realisasi (RP)
2021	Program Rehabilitasi Sosial	27.292.007.679	21.500.401.031
	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	12.309.453.517	10.030.354.865

Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	5.255.034.771	4.631.526.876
Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	2.119.354.082	1.378.043.126
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	13.411.965.175	12.371.622.422
Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	1.368.575.662	1.141.218.350
Program Kawasan Permukiman	23.907.646.911	22.966.455.624
Program Perekonomian dan Pembangunan	3.265.894.576	2.798.681.819
Program Pemberdayaan Sosial	243.846.608	199.288.880
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	17.020.729.014	14.719.339.021
Jumlah Anggaran	106.194.507.995	91.736.932.014

Sumber: LAKIP 2021 Dinas Sosial Kota Surabaya Diolah, 2022

Berdasarkan tabel diatas maka dapat dilakukan perhitungan untuk mengukur tingkat ekonomi pada tahun 2017 – 2021, adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{tahun 2017: } & \frac{218,305,062,074}{235,186,029,758} \times 100\% = 92,83\% \\ \text{tahun 2018: } & \frac{221.243.411.714}{241.568.394.697} \times 100\% = 91,37\% \\ \text{tahun 2019: } & \frac{236,422,197,976}{257,799,550,111} \times 100\% = 91,70\% \\ \text{tahun 2020: } & \frac{75.194.147.791}{81.897.916.088} \times 100\% = 91,81\% \\ \text{tahun 2021: } & \frac{91.736.932.014}{106.194.507.995} \times 100\% = 86,38\% \end{aligned}$$

Pada tahun 2017 92,83%, lalu menurun tahun 2018 menjadi 91,37%, lalu meningkat pada 2019 menjadi 91,70%, meningkat lagi di 2020 91,81% dan menurun lagi di tahun 2021 menjadi 86,38%. Hal ini biasa terjadi disebabkan program dan kendala di tiap tahunnya pun pasti berbeda. Maka dari kriteria ekonomis menyatakan kinerja Dinas Sosial Kota Surabaya pada tahun 2017-2021 terbukti ekonomis karena memiliki persentase rasio <100% tiap tahunnya.

Pengukuran Kinerja Dinas Sosial Kota Surabaya Dari Aspek Efisiensi

Berikut ini adalah tabel pengukuran efisiensi Dinas Sosial Kota Surabaya pada tahun 2017-2021:

Pengukuran Efisiensi 2017

1. Program pelayanan dan rehabilitasi Kesejahteraan sosial
Anggaran tersedia Rp168,314,871,206 dan realisasi Rp155,024,570,193 dengan persentase efisiensinya 92.10%, maka target tercapai.
2. Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial
Anggaran yang tersedia Rp1,894,803,188 dan realisasi Rp1,604,302,913 persentase efisiensinya 84.67%, maka target tercapai
3. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman
Anggaran tersedia Rp41,942,998,547 dan realisasi Rp41,473,122,245, persentase efisiensi 98.88%, maka target tercapai.

4. Program Peningkatn Ketentraman, Ketertiaan dan Kenyamanan Lingkungan
Anggaran tersedia Rp12,244,834,930 dan realisasi Rp10,802,497,255 dengan persentase efisiensi 88.37%, maka target tercapai.
5. Program pengembangan wawasan dan karakter kebangsaan dalam konteks budaya lokal
Anggaran tersedia Rp6,643,437,561 dan realisasinya Rp5,864,611,661 dengan persentase efisiensi 88.28%, maka target tercapai.
6. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Anggaran tersedia Rp155,081,750 dan realisasinya Rp155,081,750 dengan persentase efisiensi 99.13%, maka target tercapai..
7. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Anggaran tersedia Rp3,557,227,069 dan realisasinya Rp3,012,458,207 dengan persentase efisiensinya 84.69%, maka target tercapai.
8. Progrm Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana kedinasan
Anggaran tersedia Rp425,775,507 dan realisasi Rp369,771,409 persentase efisiensinya 81.67%, maka target tercapai.

Pengukuran efisiensi tahun 2018 :

1. Program pelayanan dan rehabilitasi Kesejahteraan sosial
Anggaran Rp177.653.645.732 dan realisasinya Rp163.255.660.121 persentase efisiensinya 91,89%, maka target tercapai.
2. Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial
Anggaran Rp2.149.606.121 dan realisasinya Rp1.915.096.753 dengan persentase efisiensinya 89,09%, maka target tercapai.
3. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman
Anggaran Rp34.268.173.384 dan realisasinya Rp31.836.650.780 persentase efisiensinya 92,90%, maka target tercapai.
4. Program Pnngktn Ketenterraman, Ketertibann dan Kenyamanan Lingkungan
Anggaran Rp14.686.579.538 dan realisasinya Rp12.643.117.572 persentase efisiensinya 86,09%, maka target tercapai .
5. Program pengmbangn wawasan dan karakter kebangsaan pada kontekss budaya lokal
Anggaran Rp7.283.419.528 dan realisasinya Rp6.737.624.861 persentase efisiensinya 92,51% , maka target tercapai.
6. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Anggaran Rp190.938.625 dan realisasinya Rp179.519.627 persentase efisiensinya 94,02%, maka target tercapai.
7. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Anggaran Rp4.716.695.316 dan realisasinya Rp4.117.789.735 dengan persentase efisiensinya 87,30%, maka target tercapai.
8. Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana kedinasan
Anggaran Rp619.336.453 dan realisasinya Rp557.952.265 dengan persentase efisiensinya 90,09%, maka target tercapai.

Pengukuran efisiensi Dinas Sosial Kota Surabaya pada tahun 2019,:

1. Program pelayanan dan rehabilitasi Kesejahteraan sosial
Anggaran Rp187,000,542,966 dan realisasinya Rp169,061,326,982 persentase efisiensinya 90.41%, maka target tercapai.
2. Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial
Anggaran Rp2,548,348,618 dan realisasinya Rp2,223,652,924 dengan persentase efisiensinya 87.26%, maka target tercapai.
3. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman

Anggaran Rp40,084,660,475 dan realisasinya Rp39,360,695,203 persentase efisiensinya 98.19%, maka target tercapai.

4. Program Peningkatan Ketenterman, Ketertiban dan Kenyamanan Lingkungan
Anggaran Rp14,539,998,849 dan realisasinya Rp13,000,487,251 persentase efisiensinya 89.41%, maka target tercapai.
5. Program pengembangn wawasan dan karakter kebangsaan dalam konteks budaya lokal
Anggaran Rp7,784,548,596 dan realisasinya Rp7,217,476,855 dengan persentase efisiensinya 92.72%, maka target tercapai.
6. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Anggaran Rp5,063,339,681 dan realisasinya Rp4,861,409,341 persentase efisiensinya 96.01%, maka target tercapai.
7. Program Pembangunn dan Pengelolaan Sarana dan Prasaraana kedinasan
Anggaran Rp778,110,926 dan realisasinya Rp697,149,420 persentase efisiensinya 89.60%, maka target tercapai.

Penjelasan dari pengukuran efisiensi Dinas Sosial Kota Surabaya pada tahun 2020, adalah sebagai berikut:

1. Program Bantuan Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Anggaran Rp4.176.817.339 dan realisasinya Rp3.719.504.630 persentase efisiensinya 89,05%, maka target tercapai tahun.
2. Program Partisipasi Keagamaan
Anggaran Rp13.510.136.668 dan realisasinya Rp12.003.405.683 persentase efisiensinya 88,85%, maka target tercapai.
3. Program Partisipasi Kepahlawanan
Anggaran Rp4.557.140.816 dan realisasinya Rp4.401.028.015 persentase efisiensinya 96,57%, maka target tercapai.
4. Program Pelayanan Kebutuhan Dasar dan Rehabilitasi Sosial
Anggaran Rp32.034.289.491 dan realisasinya Rp28.521.870.957 persentase efisiensinya 89%, maka target tercapai.
5. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
Anggaran Rp581.453.280 dan realisasinya Rp306.120.400 persentase efisiensinya 52,65%, maka target tercapai.
6. Program Pengendalian Layanan Sosial
Anggaran Rp2.923.252.045 dan realisasinya Rp2.830.030.489 persentase efisiensinya 96,81%, maka target tercapai.
7. Program Rehabilitasi Rumah Tapak Tidak Layak Huni
Anggaran Rp18.382.596.116 dan realisasinya Rp18.019.411.517 dengan persentase efisiensinya 98%, maka target tercapai.
8. Program Pelayanan Administrasi Perkantorn
Anggaran Rp4.954.286.940 dan realisasinya Rp4.775.245.024 dengan persentase efisiensinya 96,38%, maka target tercapai.
9. Program Pembangunn dan Pengelolaan Sarana dan Prasaraana kedinasan
Anggaran Rp777.943.393 dan realisasinya Rp617.531.076 dengan persentase efisiensinya 79,37%, maka target tercapai.

Pengukuran efisiensi Dinas Sosial Kota Surabaya pada tahun 2021 :

1. Program Rehabilitasi Sosial
Anggaran Rp27.292.007.679 dan realisasinya Rp21.500.401.031 dengan persentase efisiensinya 78,80%, maka target tercapai.
2. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
Anggaran Rp12.309.453.517 dan realisasinya Rp10.030.354.865 persentase efisiensinya 81,48%, maka target tercapai.

3. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
Anggaran Rp5.255.034.771 dan realisasinya Rp4.631.526.876 persentase efisiensinya 88,13%, maka target tercapai.
4. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Anggaran Rp2.119.354.082 dan realisasinya Rp1.378.043.126 persentase efisiensinya 65,02%, maka target tercapai.
5. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
Anggaran Rp13.411.965.175 dan realisasinya Rp12.371.622.422 dengan persentase efisiensinya 92,24%, maka target tercapai.
6. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
Anggaran Rp1.368.575.662 dan realisasinya Rp1.141.218.350 persentase efisiensinya 83,38%, maka target tercapai.
7. Program Kawasan Permukiman
Anggaran Rp23.907.646.911 dan realisasinya Rp22.966.455.624 persentase efisiensinya 96,06%, maka target tercapai.
8. Program Perekonomian dan Pembangunan
Anggaran Rp3.265.894.576 dan realisasinya Rp2.798.681.819 dengan persentase efisiensinya 85,69%, maka target tercapai.
9. Program Pemberdayaan Sosial
Anggaran Rp243.846.608 dan realisasinya Rp199.288.880 persentase efisiensinya 81,72%, maka target tercapai.
10. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Anggaran Rp17.020.729.014 dan realisasinya Rp14.719.339.021 persentase efisiensinya 86,47, maka target tercapai.

Pengukuran Kinerja Dinas Sosial Kota Surabaya Dari Aspek Efektivitas

Berikut ini adalah tabel pengukuran efisiensi Dinas Sosial Kota Surabaya pada tahun 2017-2021:

Berdasarkan hasil wawancara dengan 2(dua) Staff Umum dan Kepegawaian, kegiatan yang dilakukan Dinas Sosial Kota Surabaya telah disusun berdasarkan tuntutan yang ada di masyarakat melalui forum yang disediakan sehingga masyarakat dengan mudah memberika saran/masukan. Sejalan dengan pendapat (Novitasari & Ardini , 2021) bahwa prinsip akuntabilitas mewajibkan pemerintah menata pelayanan dengan baik dan memberi layanan pada masyarakat secara baik pula.

Tabel 6. Pengukuran Efektivitas 2017

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Hasil yang Diharapkan (Outcome)	Hasil yang Dicapai (Output)	Tingkat Efektif
1	Tujuan: Memantapkan sarana prasarana pada kawasan perumahan dan permukiman untuk mewujudkan lingkungan yang berkualitas	Kawasan permukiman yang telah ditingkatkan kualitas lingkungannya	5,124.52 Ha	4,5050.06	79,03%
	Sasaran: Meningkatkan pelayanan kebutuhan dasar bagi PMKS	Presentase terlaksananya pemenuhan kebutuhan dasar dan rehabilitasi bagi PMKS	85%	90.33%	106.27%
2	Tujuan: Meningkatkan penanganan PMKS	Persentase PMKS yang ditangani yang berhasil direhabilitasi	12 %	12.12%	101%

	Sasaran: Meningkatkan keamanan dan ketertiban lingkungan	Persentase kegiatan keagamaan yang di fasilitasi	100%	100%	100%
3	Tujuan: Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan daerah	Angka Kejadian Anarkis per 100.000 penduduk	1.02	0.27	173.53%
	Sasaran: Menurunkan jumlah rumah tidak layak huni	Presentase terlaksananya perbaikan rumah tidak layak huni	100%	100%	100%
4	Tujuan: Mewujudkan wawasan, karakter dan nilai-nilai kebangsaan	Persentase pertumbuhan partisipasi lembaga/komunitas dalam kegiatan yang mendorong nilai-nilai kebangsaan	4 %	5.38%	134.50%
	Sasaran: Meningkatkan nilai-nilai kepahlawanan	Persentase kegiatan yang mendorong nilai-nilai kepahlawanan yang di fasilitasi	100%	100%	100%
5	Tujuan: Meningkatkan tata kelola administrasi perangkat daerah yang baik	Tingkat Kepuasan Pelayanan Kedinasan	76 %	87.26%	114.82%
		Indeks kepuasan SKPD terhadap pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran	62 %	84.62%	136.48%
		Tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan program	90.84 %	100%	110.08%
	Sasaran: Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan untuk mendukung keberhasilan Program	Persentase kesesuaian pelaksanaan Kegiatan terhadap parameter perencanaan pada Operational Plan	100%	100%	100%
		Kinerja Pengelolaan Sarana, Prasarana, dan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100%	100%	100%

Sumber: LAKIP 2017 Dinas Sosial Kota Surabaya Diolah, 2022

Tabel 7. Pengukuran Efektivitas 2018

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Hasil yang Diharapkan (Outcome)	Hasil yang Dicapai (Output)	Tingkat Efektif
1	Tujuan: Memantapkan sarana prasarana pada kawasan perumahan dan permukiman untuk mewujudkan lingkungan yang berkualitas	Kawasan permukiman yang telah ditingkatkan kualitas lingkungannya	6.717,51 Ha	6.086,26	90.60%
	Sasaran:	Presentase terlaksananya	85%	107.62%	126,61%

	Meningkatkan pelayanan kebutuhan dasar bagi PMKS	pemenuhan kebutuhan dasar dan rehabilitasi bagi PMKS			
2	Tujuan: Meningkatkan penanganan PMKS	Persentase PMKS yang ditangani yang berhasil direhabilitasi	13%	27,28%	209,84%
	Sasaran: Meningkatkan keamanan dan ketertiban lingkungan	Persentase kegiatan keagamaan yang di fasilitasi	100%	100%	100%
3	Tujuan: Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan daerah	Angka Kejadian Anarkis per 100.000 penduduk	0,99	0.37	162,25%
	Sasaran: Menurunkan jumlah rumah tidak layak huni	Presentase terlaksananya perbaikan rumah tidak layak huni	100%	100%	100%
4	Tujuan: Mewujudkan wawasan, karakter dan nilai-nilai kebangsaan	Persentase pertumbuhan partisipasi lembaga/komunitas dalam kegiatan yang mendorong nilai-nilai kebangsaan	4%	14,29%	357,14%
	Sasaran: Meningkatkan nilai-nilai kepahlawanan	Persentase kegiatan yang mendorong nilai-nilai kepahlawanan yang di fasilitasi	100%	100%	100%
5	Tujuan: Meningkatkan tata kelola administrasi perangkat daerah yang baik	Tingkat Kepuasan Pelayanan Kedinasan	77%	91,77%	119,18%
		Indeks kepuasan SKPD terhadap pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran	64%	91,77%	143,39%
		Tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan program	91,53 %	100%	109,25%
	Sasaran: Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan untuk mendukung keberhasilan Program	Persentase kesesuaian pelaksanaan Kegiatan terhadap parameter perencanaan pada Operational Plan	100%	100%	100%
		Kinerja Pengelolaan Sarana, Prasarana, dan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100%	100%	100%

Sumber: LAKIP 2018 Dinas Sosial Kota Surabaya Diolah, 2022

Tabel 9. Pengukuran Efektivitas 2019

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Hasil yang Diharapkan (Outcome)	Hasil yang Dicapai (Output)	Tingkat Efektif
1	Tujuan: Memantapkan sarana	Kawasan permukiman yang telah ditingkatkan	8,295.65 Ha	7.871,92	94,89%

	prasarana pada kawasan perumahan dan permukiman untuk mewujudkan lingkungan yang berkualitas	kualitas lingkungannya			
	Sasaran: Meningkatkan pelayanan kebutuhan dasar bagi PMKS	Presentase terlaksananya pemenuhan kebutuhan dasar dan rehabilitasi bagi PMKS	85%	99,20%	116,70%
2	Tujuan: Meningkatkan penanganan PMKS	Persentase PMKS yang ditangani yang berhasil direhabilitasi	14%	28,24%	201,73%
	Sasaran: Meningkatkan keamanan dan ketertiban lingkungan	Persentase kegiatan keagamaan yang difasilitasi	100%	100%	100%
3	Tujuan: Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan daerah	Angka Kejadian Anarkis per 100.000 penduduk	0,95	0,44	153,51%
	Sasaran: Menurunkan jumlah rumah tidak layak huni	Presentase terlaksananya perbaikan rumah tidak layak huni	100%	99,00%	99,09%
4	Tujuan: Mewujudkan wawasan, karakter dan nilai-nilai kebangsaan	Persentase pertumbuhan partisipasi lembaga/komunitas dalam kegiatan yang mendorong nilai-nilai kebangsaan	4%	12,50%	312,50%
	Sasaran: Meningkatkan nilai-nilai kepahlawanan	Persentase kegiatan yang mendorong nilai-nilai kepahlawanan yang difasilitasi	100%	100%	100%
5	Tujuan: Meningkatkan tata kelola administrasi perangkat daerah yang baik	Tingkat Kepuasan Pelayanan Kedinasan	78%	89,81%	115,14%
		Indeks kepuasan SKPD terhadap pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran	66%	88,81%	134,56%
		Tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan program	91,96 %	100%	108,74%
	Sasaran: Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan untuk mendukung keberhasilan Program	Persentase kesesuaian pelaksanaan Kegiatan terhadap parameter perencanaan pada Operational Plan	100%	100%	100%

Kinerja Pengelolaan Sarana, Prasarana, dan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100%	99,13%	99,13%
--	------	--------	--------

Sumber: LAKIP 2019 Dinas Sosial Kota Surabaya Diolah, 2022

Tabel 10. Pengukuran Efektivitas 2020

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Hasil yang Diharapkan (Outcome)	Hasil yang Dicapai (Output)	Tingkat Efektif
1	Tujuan: Menurunkan potensi wilayah perumahan kumuh	Persentase wilayah dengan rumah tapak yang layak huni seluruhnya	85%	86,55%	101,83%
	Sasaran: Menurunkan jumlah rumah tidak layak huni	Presentase terlaksananya perbaikan rumah tidak layak huni	100%	99,57%	99,57%
2	Tujuan: Meningkatkan kesejahteraan PMKS	Persentase PMKS yang tertangani	45%	60,72 %	134,90%
	Sasaran: Meningkatkan pelayanan kebutuhan dasar bagi PMKS	Presentase terlaksananya pemenuhan kebutuhan dasar dan rehabilitasi bagi PMKS	85%	60,72%	71,44%
3	Tujuan: Meningkatkan nilai-nilai keagamaan dalam Kehidupan bermasyarakat	Persentase peserta kegiatan keagamaan yang memahami nilai-nilai keagamaan	100%	100 %	100%
	Sasaran: Meningkatkan kegiatan yang memberikan pemahaman nilai-nilai keagamaan	Persentase kegiatan keagamaan yang difasilitasi yang berjalan dengan lancar	100%	100 %	100%
4	Tujuan: Meningkatkan pemahaman nilai-nilai kepahlawanan dalam kehidupan bermasyarakat	Persentase peserta kegiatan kepahlawanan yang memahami nilai-nilai kepahlawanan	100%	100 %	100%

	Sasaran: Meningkatkan kegiatan yang memberikan pemahaman nilai-nilai kepahlawanan	Persentase kegiatan yang mendorong nilai-nilai kepahlawanan yang difasilitasi yang berjalan dengan lancar	100%	73,33%	73,33%
5	Tujuan: Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP	71 %	76,94 %	108,37%
	Sasaran: Terjaganya kesesuaian pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan	Kinerja pengelolaan sarana dan prasarana Serta administrasi perkantoran di Perangkat Daerah Pemerintah Kota Surabaya	100%	100 %	100%

Sumber: LAKIP 2020 Dinas Sosial Kota Surabaya Diolah, 2022

Tabel 11. Pengukuran Efektivitas 2021

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Hasil yang Diharapkan (Outcome)	Hasil yang Dicapai (Output)	Tingkat Efektif
1	Tujuan: Meningkatkan kesejahteraan PMKS	Persentase PMKS yang tertangani	45 %	50,63 %	112,52%
	Sasaran: Meningkatkan pelayanan kebutuhan dasar bagi PMKS	Presentase terlaksananya pemenuhan kebutuhan dasar dan rehabilitasi bagi PMKS.	85 %	50,63 %	59,56 %
2	Tujuan: Meningkatkan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat.	Persentase peserta kegiatan keagamaan yang memahami nilai-nilai keagamaan.	100%	97,81 %	97,81 %
	Sasaran: Meningkatkan kegiatan yang memberikan pemahaman nilai-nilai keagamaan	Persentase kegiatan keagamaan yang di fasilitasi yang berjalan dengan lancar .	100%	22,09 %	22,09 %
3	Tujuan: Meningkatkan pemahaman nilai-nilai kepahlawanan dalam kehidupan bermasyarakat.	Persentase peserta kegiatan kepahlawanan yang memahami nilai-nilai kepahlawanan.	100%	91,45 %	91,45 %
	Sasaran: Meningkatkan kegiatan yang	Persentase kegiatan yang mendorong nilai-nilai	100 %	66,67 %	66,67 %

	memberikan nilai kepahlawanan	kepahlawanan pemahaman nilai- yang di fasilitasi yang berjalan dengan lancar.			
4	Tujuan: Menurunkan potensi wilayah perumahan kumuh.	Persentase wilayah dengan rumah tapak yang layak huni seluruhnya.	100%	73,99 %	73,99 %
	Sasaran: Menurunkan jumlah rumah tidak layak huni .	Presentase terlaksananya perbaikan rumah tidak layak huni .	100%	100 %	100 %
5	Tujuan: Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP	85%	80.38 %	94,56 %
	Sasaran: Terjaganya kesesuaian pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan	Kinerja pengelolaan sarana dan prasarana serta administrasi perkantoran di Perangkat Daerah Pemerintah Kota Surabaya	100%	100%	100%

Sumber: LAKIP 2021 Dinas Sosial Kota Surabaya Diolah, 2022

Tabel 12. Hasil wawancara dengan Narasumber Kegiatan disusun berdasarkan tuntutan yang ada di masyarakat

No	Narasumber	Hasil wawancara
1	Staff Umum dan Kepegawaian	Kita memiliki forum perangkat daerah yang dapat menampung aspirasi masyarakat, sehingga apabila sudah terkumpul dapat direkap lalu melakukan evaluasi serta perbaikan dari kegiatan yang Dinas Sosial Kota Surabaya sedang lakukan atau yang akan dilakukan.
2	Staff Umum dan kepegawaian	Biasanya pada saat rapat bidang penyusunan perencanaan, kami melibatkan tokoh setempat dan narasumber universitas sehingga dari situ pendapat atau masukan yang diberikan oleh mereka dapat dijadikan sebagai evaluasi

Sumber: Hasil wawancara dengan 2(dua) Staff Umum dan Kepegawaian

Berdasarkan hasil wawancara dengan 2(dua) Staff Umum dan Kepegawaian, kegiatan yang dilakukan Dinas Sosial Kota Surabaya telah disusun berdasarkan tuntutan yang ada di masyarakat melalui forum yang disediakan sehingga masyarakat dengan mudah memberikan saran/masukan. Sejalan dengan pendapat (Novitasari & Ardini , 2021) bahwa prinsip akuntabilitas mewajibkan pemerintah menata pelayanan dengan baik dan memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan baik pula.

Tabel 13. Hasil wawancara dengan Narasumber Masyarakat dapat mengakses informasi- informasi terkait pelaksanaan program

No	Narasumber	Hasil wawancara
----	------------	-----------------

1	Staff Umum dan Kepegawaian	Melalui website Dinas Sosial Kota Surabaya dengan link https://dinassosial.surabaya.go.id/ dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat yang mana didalamnya selalu terupdate mengenai program terkini. Selain itu media sosial seperti IG dan FB terbuka untuk umum dan masyarakat dengan mudah mendapatkan informasi.
2	Masyarakat	Saya dengan mudah dapat mengakses website yang dimiliki oleh Dinsos Kota Surabaya untuk mengetahui apa saja sih kegiatan/program yang sedang dilaksanakan akhir-akhir ini, dan juga selain itu Dinsos Kota Surabaya memiliki media sosial yang suka memberikan informasi yang dibutuhkan.

Sumber: Hasil wawancara dengan staff umum dan kepegawaian dan masyarakat Kota Surabaya

Berdasarkan hasil wawancara serta didukung pendapat ahli disimpulkan Dinas Sosial Kota Surabaya berhasil menyelenggarakan transparansi terkait masyarakat bisa akses informasi seperti pelaksanaan program melalui website dan media sosial yang Dinas Sosial Kota Surabaya miliki. Melalui keterbukaan ini mencerminkan bahwa Dinas Sosial Kota Surabaya menerapkan konsep good governance dengan baik.

5. Penutup

Perhitungan persentase yaitu 92,83% pada 2017, 91,37% untuk tahun 2018, 91,70% untuk tahun 2019, 91,81% untuk tahun 2020, dan 86,38% untuk tahun 2021. Dengan demikian menunjukkan bahwa tingkat pencapaian kinerja Dinas Sosial Kota Surabaya telah ekonomis atau sudah berhasil kelola pemakaian anggaran dengan bijak dan hemat. Perhitungan persentase 89,72% untuk tahun 2017, 90,49% untuk tahun 2018, 91,94% untuk tahun 2019, 87,40% untuk tahun 2020, dan 83,90% untuk tahun 2021. Dengan demikian Dinas Sosial Kota Surabaya telah menggunakan target dan anggaran keseluruhan secara efisien dan mampu melaksanakan kegiatan secara optimal. Dari segi efektivitas menunjukkan pada tahun 2017-2021 dinilai efektif. Dari prinsip akuntabilitas telah dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Surabaya dan sudah jalankan prosedur berlaku, bisa diartikan tanggung jawab pada pemerintah telah dilaksanakan sesuai kebijakan dan prinsip good governance.

Dinas Sosial Kota Surabaya perlu selalu melakukan peningkatan kemampuan keuangan daerah dan memperhatikan lagi tingkat ekonomis dan efisiensi pada pemakaian dana. Pemerintah wajib dapat tekan realisasi terhadap anggaran yang tersedia supaya terbentuk kinerja keuangan daerah yang lebih baik di tahun berikutnya.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Syukry. (2010). Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Akuntabilitas Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance. 12 Januari 2010
- Amir, M.F. (2018). *Memahami Evaluasi Kinerja Karyawan Konsep dan Penilaian Kinerja di Perusahaan*. Jakarta : Mitra Wacana Media.
- Andriani, W., Rosita, I., & Ihsan, H. (2015). Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam wujudkan good governance Politeknik Negeri Padang. *Akuntansi dan Manajemen*. 10(2), 51-60.
- Astuti, S. (2016). *Penerapan Konsep Value For Money Menilai Kinerja Pelayanan Sektor Publik Rumah Sakit Labuan Bajo Kota Makassar*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Makassar: Makassar.

- Ateng, B. D. G., Waworundeng, W., & Kumayas, N. (2022). Efektivitas Pelayanan Sistem Informasi E-Passport Di Kantor Imigrasi Kelas I Manado. *GOVERNANCE*, 2(2).
- Dika Husni S. & Priyadi, M. (2019). *Analisis Value for Money Dalam Pengukuran Kinerja Dinas Kesehatan Kota Surabaya. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 8(12). <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/2719/2729>
- Dwiyanto, A. (2015). Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik, *Gadiah Mada University Press*
- Farida, V., Jati, A. W., & Harventi, R. (2018). Analisa Akutabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Di Kecamatan Candipura Kabupaten Lumajang. *Jurnal Akademi Akutansi*, 1(1).
- Immanuel R. A. Poli,. (2020). *Analisis Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintahan Provinsi Sulawesi Utara Berdasarkan Konsep Value For Money. Jurnal EMBA*. 8(4) : 781-788. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/emba/article/view/31072>
- Khairunnisa, A. (2021). Analisis Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah dengan Menggunakan Prinsip Value for Money (Studi Kasus pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara). (*Doctoral dissertation, UMSU*).
- Mahmudi. (2015). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Edisi Ketiga. Cetakan Pertama. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
- Mahmudi. 2007. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Edisi Revisi. UPP STIM YKPN. Yogyakarta
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : Andi
- Mardiasmo. (2016). *Efisiensi dan Efektifitas*. Jakarta : Andy.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : Andi.
- Meiliya D., E., & Lestari, V. A. (2020). Analisis Laporan Realisasi Anggaran untuk Menilai Kinerja Keuangan Pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Oku. *Balance: Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 5(2) : 135-144.
- Miftakul Erviani I. N. (2021). *Pengukuran Kinerja Dengan Pendekatan Value For Money Sebagai Perwujudan Good Governance. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*. 10(9). <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/4176>
- Mukminati Ridwan A. (2017). Konsep Vallue For Money: Alternatif Pengukuran Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Luwu Timur. Universitas Muhammadiyah Makassar. *ASSETS*. 7(1) : 104-119. <https://docplayer.info/72371291-Konsep-value-for-money-alternatif-pengukuran-kinerja-pada-dinas-pekerjaan-umum-luwu-timur.html>
- Narastri, M., dkk, (2021). Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Dan Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Surabaya : Sebuah Tinjauan Teoritis. *Jea17 Jurnal Ekonomi Akuntansi*, 6(1). <https://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/JEA17/article/view/5220/3657>
- Novitasari, M. E. I., & Ardini, L. (2021). Pengukuran Kinerja Dengan Pendekatan Value For Money Sebagai Perwujudan Good Governance. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 10(9).
- Permana, D. A., & Riharjo, I. B. (2017). *Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah Daerah dalam Perspektif Value For Money. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 6(5).
- Putu Adi Erawan. (2018). *Peranan Value For Money Untuk Mengukur Kinerja Pemerintahan Kabupaten Buleleng. Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, 8(3). Desember 2018. Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja, Bali, Indonesia. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJA/article/view/20010/11982>
- Risha Novia Haryadi. (2021). Analisis Peran Akuntansi Dalam Mewujudkan Good Governance. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*: 10(1). Januari 2021. <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/3725/3740>
- Rismawati, Mattalata. (2018). *Evaluasi Kinerja Penilaian Kinerja Atas Dasar Prestasi Kerja Berorientasi Kedepan*. Makassar : Celebes Media Perkasa.

- Rosi Permata Sari. (2020). Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Kota Medan. Universitas Medan Area
- Saut Parlindungan Sinaga, dkk (2021). *Implementasi Konsep Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Kecamatan Di Kota Pematangsiantar*. 8(1). September 2021. Universitas Sumatera Utara. <http://governance.lkispol.or.id/index.php/description/article/view/33>
- Sayuti, S., Majid, J., & Juardi, S. S. (2018). Perwujudan Nilai Transparansi, Akuntabilitas dan Konsep Value For Money dalam Pengelolaan Akuntansi Keuangan Sektor Publik. *ATESTASI: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 1(1) : 16-28.
- Sedarmayanti. (2017). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung : Refika Aditama
- Setyaningrum Irna. (2017). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Pengawasan Berpengaruh Terhadap Kinerja Anggaran Dengan Konsep Value For Money Pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Yogyakarta. *Universitas Negeri Yogyakarta*.
- Sugiono, (2017), *Metode Penelitian Bisnis : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, dan R&D*. Bandung : CV Alfabeta.
- Trihastuti, A. Pristiana, U., & Hidayati, C., (2017). *Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Santan Kelapa Pada Kelompok Usaha Perajin Kelapa*. *JPM17: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(02). <http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/jpm17/article/view/1065/948Sawir>,
- Tsabita Ananda M. (2022). Analisis Kinerja melalui Pendekatan Value For Money Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau Periode 2018-2020. *Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*.
- Wahdaniyah. (2021). Perwujudan Nilai–Nilai Transparansi, Akuntabilitas dan Konsep Value For Money Dalam Pengelolaan Akuntansi Keuangan Sektor Publik Pada Bappeda Kab. Gowa. *Universitas Muhammadiyah Makassar*.
- www.syukriy.wordpress.com/.../pewujudan-transparansi-da...
- Yohana Maria V.I.L, (2021). Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur. *Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya*.
- Yulitiawati, Y., & Rusmidarti, R. (2021). Analisa Pengukuran Kinerja Organisasi Sektor Publik Dengan Menggunakan Pendekatan Value For Money Di Kabupaten OKU. *JETAP*, 1(2), 91-109. <http://journal.unbara.ac.id/index.php/etap/article/view/966>
- Zubair, E. & Koton, Y.P. (2016). *Pengelolaan Danau Limboto Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Penerbit CV Budi Utamo.